

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam menerapkan pemerintah yang baik menjadi tugas utama pemerintah. Pemerintah harus senantiasa tanggap dan mengerti akan lingkungannya serta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan melaksanakan segala tugas yang diamanatkan dan senantiasa bertanggungjawab terhadap pembagian tugas yang dipercayakan oleh penyelenggara negara. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan suatu upaya pemerintah sebagai bentuk pelayanan dan tanggungjawabnya kepada publik. Maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan dalam pengelolaannya. Dalam tahap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibutuhkan keterlibatan individu dalam tahap pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh satuan kerja/instansi pemerintah setiap tahun sebelum memasuki tahun anggaran berkenaan mulai dari instansi vertikal di daerah hingga tingkat kementerian/lembaga negara. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena melibatkan berbagai pihak seperti manajer dan bawahan yang sama-sama memiliki peranan penting mulai dari proses perencanaan, mengevaluasi penyusunan anggaran sampai pada tujuan dari anggaran itu sendiri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan organisasi

pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1997 dalam Hidayah). Keterlibatan individu dalam menyusun anggaran diharapkan dapat mendorong terciptanya realisasi fungsi anggaran yang tidak hanya sekedar alat perencanaan semata tapi lebih jauh anggaran mampu menciptakan pengendalian bagi manajer dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi serta dapat memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dimana anggaran yang digunakan harus jelas dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana publik mengenai pelaksanaan kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penyusunan ataupun pelaksanaan anggaran, dalam diri individu harus ditumbuhkan salah satu sikap yang dapat mendorong diri individu untuk dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu sikap yang dimaksud adalah komitmen organisasi.

Menurut Darlish (2002) dalam Fibrianti dan Riharjo (2013) komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Individu yang memiliki komitmen yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha keras dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bentuk profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah ditentukan sangat diperlukan bagi

terwujudnya kualitas kinerja Aparatur Negara yang berorientasi pada mutu pelayanan publik (*public service*) untuk mencapai tujuan organisasi. Tinggi rendahnya komitmen pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi (Siagian:2002) dalam Mongeri (2013). Dengan adanya komitmen organisasi dalam diri individu, diharapkan akan mempengaruhi dirinya untuk berusaha keras dalam menjalankan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Apabila semua tugas yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya maka itu merupakan suatu prestasi kerja yang baik yang nantinya akan meningkatkan kinerja manajerial.

Kinerja manajerial dapat diartikan sebagai kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, dan negosiasi (Mahoney dalam Muharrom, 2014). Fungsi perencanaan harus dilakukan manajer dengan baik mulai dari pemilihan strategi, kebijakan, program dan prosedur. Manajer harus membuat secara rinci dan jelas daftar kegiatan ataupun program yang akan dilakukan terkait dengan besarnya pengeluaran dan penerimaan yang tersedia sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi investigasi dapat dilakukan manajer dengan mengumpulkan dan menyampaikan berbagai informasi dalam tahap penyusunan laporan, mengukur hasil sampai dengan menganalisa pekerjaan. Apabila dalam tahapan investigasi ini manajer tidak menemukan satupun kendala dalam penyusunan laporan, maka itu merupakan suatu prestasi kerja yang baik. Fungsi koordinasi dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi guna mengaitakan dan menyesuaikan program. Manajer harus

memiliki kemampuan dalam mengsinkronisasikan berbagai perbedaan pendapat dalam diri individu lain guna mencapai tujuan bersama.

Fungsi evaluasi digunakan manajer untuk menilai dan mengukur kinerja pegawai mulai dari penilaian pegawai sampai pada penilaian laporan keuangan. Apabila dalam tahap evaluasi ini tidak ditemukan kecenderungan dalam hal penyajian dan pelaporan keuangan maka ini merupakan suatu prestasi kerja yang baik yang akan meningkatkan kinerja manajer itu sendiri. Manajer yang memiliki kemampuan yang handal dan memadai harus bisa mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Apabila fungsi pengawasan ini tidak dijalankan dengan baik maka akan menggagalkan semua kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan ini harus jelas, terarah dan terkontrol dengan baik agar hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Fungsi Penataan staf dalam suatu organisasi merupakan tahap awal dalam mempersiapkan dan melatih karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka seorang manajer harus mengetahui kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan sebelum menempatkannya pada bagian pekerjaannya. Hal ini dilakukan agar nantinya karyawan tersebut akan merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya dan merasa puas dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Apabila penempatan pekerjaan ini telah dilakukan dengan baik, maka hal itu akan memudahkan manajer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang merasa puas dengan lingkungan pekerjaannya akan membantu manajer dalam menjalankan tugas-tugasnya dan senantiasa berusaha keras untuk mencapai kinerja yang optimal.

Fungsi negosiasi dapat dilakukan manajer pada saat melakukan pembelian, tawar menawar sampai dengan melakukan kontrak untuk barang dan jasa. Manajer yang baik harus memiliki kemampuan dalam melakukan berbagai kegiatan – kegiatan tersebut. Apabila dalam diri manajer memiliki kemampuan bernegosiasi yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan semua kegiatan yang direncanakan akan berjalan sesuai dengan target dan hasil yang diharapkan nanti. Dan apabila semua fungsi manajerial ini telah dilakukan dan dijalankan dengan baik oleh manajer maka itu merupakan suatu bentuk kerja yang baik yang nantinya akan meningkatkan kinerja manajerial. Karena kinerja manajerial dilihat berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat, mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan melalui observasi dan wawancara dengan salah satu pegawai yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tersebut mengatakan bahwa masalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu pembuatan jalan pada Desa Wonosari tidak sesuai dengan realisasinya. Berdasarkan hasil temuan dari BPK dimana anggaran yang diberikan untuk pembuatan jalan pada Desa Wonosari sebesar 1 Milyar namun ternyata realisasinya hanya mencapai Rp. 953.785.000,00. Hal ini tentu sangat merugikan keuangan Negara.

Permasalahan lain yang sering terjadi dalam penerimaan/pelaksanaan dana tugas pembantuan diantaranya : 1. belum sinkronnya penataan proses perencanaan dan penganggaran program di Daerah sehingga dimungkinkan

terjadi tumpang tindih anggaran dan/atau bantuan tersebut tidak memenuhi kebutuhan daerah, 2. belum seragamnya Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan terkait dengan fungsi koordinasi untuk mengaitkan atau menyesuaikan program dari masing-masing Departemen yang berakibat kurang efisien sehingga memperlambat proses pencairan dana yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian Suryanawa (2008) yang melakukan penelitian di Kantor SKPD di Kabupaten Bandung hasil pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah, sedangkan hasil tes kedua menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Penelitian Anggraeni (2009) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Kota Labuhan Batu hasil penelitiannya menyebutkan bahwa secara parsial maupun simultan tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kota Labuhan Batu. Febrianti dan Riharjo (2013) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, dan ketiaktastian lingkungan terhadap kinerja manajerial pada Pemerintahan Kota Surabaya hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan uraian dan Fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan**

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo “.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Temuan BPK terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu pembuatan jalan, dimana anggaran yang diberikan untuk pembuatan jalan pada Desa Wonosari sebesar 1 Milyar, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ternyata realisasinya hanya mencapai Rp. 953.785.000,00.
2. Belum sinkronnya penataan proses perencanaan dan penganggaran program di Daerah sehingga dimungkinkan terjadi tumpang tindih anggaran dan/atau bantuan tersebut tidak memenuhi kebutuhan daerah.
3. Belum seragamnya Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan terkait dengan fungsi koordinasi untuk mengaitkan atau menyesuaikan program dari Masing – masing Departemen yang berakibat kurang efisien sehingga memperlambat proses pencairan dana yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja manajerial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
2. Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara parsial terhadap kinerja manajerial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja manajerial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara parsial terhadap kinerja manajerial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

3. 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya partisipasi anggaran dengan didorong oleh komitmen organisasi yang tinggi dalam diri individu yang dapat meningkatkan kinerja manajerial.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis untuk menerapkan sistem anggaran yang efektif sebagai alat bantu manajemen dalam mengevaluasi dan untuk meningkatkan kinerja manajerial.